

PROSES PEMILIHAN UMUM 1955 DI INDONESIA

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:
Singgih Bambang Permadi
09406241036

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PROSES PEMILIHAN UMUM 1955 DI INDONESIA

Oleh

Singgih Bambang Permadi dan Dr. Aman, M. Pd.

ABSTRAK

Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan di negara Republik Indonesia. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 29 September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar baru. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi pemerintahan Indonesia sebelum pemilihan umum 1955, (2) mengetahui proses terjadinya pemilihan umum 1955 di Indonesia, (3) mengetahui hasil pemilihan umum 1955 di Indonesia.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowidjyo. Tahap pertama adalah pemilihan topik sebagai kegiatan awal untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber yang didapat dari sumber tertulis yang diperoleh dari buku-buku di Perpustakaan dan juga dari Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Tahap ketiga adalah verifikasi yaitu kritik sejarah atau keabsahan sumber. Tahap keempat adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran untuk mengkorelasikan data dari berbagai sumber. Tahap kelima adalah penulisan sejarah sebagai hasil dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan awal negara Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau parlementer gaya barat yang berakhir setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin. Pelaksanaan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 diselenggarakan dalam tiga tahap kabinet yang berbeda yaitu kabinet Wilopo, Ali Sastroamidjojo dan Burhanudin Harahap. Pengesahan undang-undang pemilihan umum dilaksanakan pada masa kabinet Wilopo yang mengeluarkan Undang-Undang Dasar No.7 Tahun 1953 sebagai dasar hukum pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan tahap berikutnya yaitu kampanye pemilihan umum yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap pertama ketika disahkannya undang-undang pemilihan umum pada 4 April 1953. Tahap kampanye yang kedua yaitu ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1954. Kabinet Burhanudin Harahap melaksanakan hari pencoblosan dan pemungutan suara yang dihadiri lebih dari 39 juta orang Indonesia. Sebanyak 37.875.299 atau 87,65 persen dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya, memberikan suara secara sah menempatkan PNI, Masyumi, NU dan PKI sebagai empat besar pemenang pemilihan umum 1955.

Kata kunci : Pemilihan Umum 1955, Undang-Undang Pemilihan Umum, Kabinet

I. Pendahuluan

Pada tahun 1955 negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara yang berdemokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana rakyat berperan langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (Hadi Wiyono, 2007: 101). Sarana dari demokrasi adalah pemilihan umum yang ditujukan untuk menampung aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum adalah mekanisme politik yang berhubungan erat dalam sistem politik demokrasi dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon-calon yang mereka dukung (Ahmad Syafii Maarif, 1996: 41). Pergeseran kekuasaan seperti pergantian pimpinan negara (suksesi) dan pimpinan pemerintahan, perubahan haluan negara dan politik secara konstitusional aman dan teratur tanpa kekacauan dan kekerasan atau kup adalah dengan pemilihan umum.

Sejarah pemilihan umum di Indonesia dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum nasional sudah diumumkan pada 5 Oktober 1945, kemudian pada 1946 diadakan pemilihan umum di Karesidenan Kediri dan Surakarta yang cakupannya untuk lokal saja sedangkan untuk skala nasional masih belum bisa terealisasi (Herbert Feith, 1999: 2). Bahkan sejak tahun 1950, janji-janji mengenai pemilihan umum nasional sudah sering dikemukakan oleh berbagai kabinet. Dalam kenyataannya, pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan umum untuk mengurus hal-hal yang lebih penting dibandingkan dengan pemilihan umum, ditambah dengan adanya gerakan menentang diadakannya pemilihan umum yang dilancarkan oleh sejumlah partai serta kelompok-kelompok anggota parlemen sementara mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum tahun 1955 ini merupakan pemilihan umum yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh

kabinet Ali Sastroamidjojo dan kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Wilopo mempersiapkan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan pemilihan umum sampai tahap kampanye kemudian diganti kabinet Burhanuddin Harahap yang melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara. Peristiwa yang mendorong dan mempercepat adanya pemilu 1955 ini ialah Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu terjadinya demonstrasi di depan Istana Negara dan pengrusakan gedung parlemen oleh para demonstran dengan tujuan meminta pembubaran parlemen (Imam Suhadi, 1981: 6).

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri belum stabil karena saat itu Indonesia sedang menghadapi serangan dari Belanda dan sekutunya yang bermaksud untuk menguasai kembali Republik Indonesia. Oleh karena itulah pembahasan ini menjadi menarik, tatkala melihat upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama di negara Indonesia ini agar berjalan sesuai harapan ditengah kondisi politik dalam negeri yang tidak kondusif. Walaupun demikian, oleh berbagai kalangan pemilihan umum 1955 dianggap sebagai pemilihan umum yang terbaik diantara beberapa pemilihan umum yang sudah dilaksanakan di Indonesia karena dianggap jauh dari kecurangan dan bersih dari hal-hal yang berbau politik padahal negara Indonesia baru tumbuh dan berkembang menjadi negara yang berdemokrasi.

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan sebuah penelitian atau karya ilmiah diperlukan kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran (A. Daliman, 2006: 3). Sebagian besar bab dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan buku Karya Herbert Feith yaitu *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (1999) yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia diterjemahkan oleh Nugroho Katjasungkana dkk juga dari Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum 1955. Dalam buku yang ditulis oleh

Herbert Feith yang berjudul *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, dijelaskan mengenai proses pemilihan umum yang dimulai dari masa kampanye partai-partai politik pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Setelah itu dijelaskan mengenai pemungutan suara yang dilakukan di daerah-daerah di seluruh wilayah republik Indonesia dan di bagian akhir merupakan analisis hasil pemilihan umum dari sang penulis.

Selanjutnya adalah buku karya Imam Suhadi dengan judul *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1981. Buku ini menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pemilu tahun 1955, landasan hukum pemilu 1955, pelaksanaan pemilu 1955 dan pengaruhnya. Dalam buku ini dipaparkan mengenai sistem pemilihan umum yang dapat mengantarkan kepada demokrasi yang wajar, parlemen yang berfungsi sekaligus menjamin hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi pada umumnya. Pemilihan umum sesuai dengan ciri-ciri negara demokrasi modern untuk melaksanakan kehendak rakyat melalui sistem seleksi atau pemilihan orang-orang cakap dengan delegasi atau penyerahan. Indonesia adalah negara yang demikian luas dan tidak mungkin melaksanakan demokrasi secara referendum seperti di Swiss dan demokrasi kuno di Yunani sehingga dilakukan pemilihan umum (Koentjoro Poerbopranoto, 1975: 17).

B. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan rekonstruksi sejarah melalui proses pengujian dan menganalisis secara kritis dari peninggalan masa lampau (Ankersmith, 1984: 268). Pengertian historiografi sendiri ada yang berupa pengertian sempit dan pengertian luas, untuk pengertian sempit historiografi berarti perkembangan penulisan dalam peradaban dunia sedangkan dalam pengertian luas historiografi diartikan sebagai perkembangan penulisan yang didalamnya memuat teori dan metodologi sejarah (Anggar Kaswati, 1998: 27-28). Dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa sumber-sumber yang berkaitan antara lain:

Skripsi karya Nur Efri Setyadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul "Eksistensi Masyumi pada Pemilihan Umum 1955". Skripsi ini memfokuskan pada peran partai Masyumi dalam pemilihan umum 1955 yang merupakan satu diantara empat partai besar pemenang pemilu dan dipaparkan pula hasil pemilu 1955. Perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti yaitu, peneliti membahas proses pemilihan umum 1955 yang diikuti beberapa partai tidak hanya Masyumi saja.

Kedua adalah skripsi karya Muhamad Sulthon Fatawi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang berjudul "Dinamika Politik Pada Pemilu 1955 di Kediri". Skripsi ini memfokuskan pada keadaan politik di Kediri sebelum Pemilu 1955 dan perkembangannya setelah pemilu 1955. Perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti adalah peneliti mengambil proses dan perkembangan pemilu secara keseluruhan dan tidak memfokuskan pada suatu daerah atau dalam kata lain secara nasional.

Ketiga adalah skripsi karya Nugraha Widya Putra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul "Pengaturan Hak Pilih TNI dan Polri Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Perbandingan Pemilu 1955, Orde Baru dan Era Reformasi)". Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan hak pilih TNI dan Polri dalam sistem demokrasi di Indonesia pada pemilu tahun 1955, Orde Baru dan Era Reformasi. Perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti adalah peneliti didalam bab pembahasannya mencantumkan kriteria hak pilih bagi semua warga negara, tidak hanya TNI dan Polri saja.

C. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian sejarah pada dasarnya terikat pada prosedur metode sejarah. Metode sejarah sendiri merupakan aturan serta prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber

sejarah secara efektif dan menilainya secara kritis yang dibuat dalam bentuk tulisan. Diperlukannya metode adalah sebagai cara untuk mendapatkan obyek. Juga dikatakan bahwa metode adalah cara untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur (Suhartono W. Pranoto, 2006: 11).

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Sejarah Kritis sesuai dengan teori Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) heuristik (pengumpulan data), (3) verifikasi (kritik sumber, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) historiografi (penulisan) (Kuntowijoyo, 1995: 90).

a. Pemilihan topik

Tahap awal dalam melakukan penelitian maupun penulisan yaitu menentukan topik. Penentuan topik menjadi penentu langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya, agar peneliti fokus dalam pencarian sumber. Menentukan topik tentu bukan hal yang mudah, dimana peneliti dituntut untuk cerdas dan bijak dalam memutuskan suatu topik tertentu yang akan dikaji. Mulai dari menarik atau tidaknya suatu topik, ketersediaan sumber, data, serta kesesuaian dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Ketertarikan peneliti terhadap suatu topik yang timbul dari dirinya akan membantu memperlancar penyusunan penulisan suatu penelitian.

b. Heuristik

Heuristik (pengumpulan data) merupakan kegiatan untuk menemukan sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan foto-foto. Untuk menjadikan historiografi perlu dicari sumber-sumbernya, baik sumber primer, sekunder, tersier maupun historis. Tahap ini digunakan penulis untuk melakukan proses pencarian dan berbagai sumber literatur di berbagai perpustakaan yang

mempunyai koleksi buku atau menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Perpustakaan yang menjadi tujuan penulis antara lain: Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Laboratorium Pendidikan Sejarah UNY, Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta, Perpustakaan St. Kolese Ignatius Kota Baru Yogyakarta, dan Kantor Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta.

Sumber sejarah merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam penyusunan penelitian karena sumber sejarah merupakan instrument utama dalam pengolahan data dan merekonstruksi sejarah. Berdasarkan bahannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (*artifact*). Dokumen dapat berupa surat-surat, notulen rapat, kontrak kerja, sedangkan artifact berupa foto-foto, bangunan dan alat-alat (Nugroho Notosusanto, 1971: 135). Sedangkan sumber-sumber sejarah menurut sifatnya dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer dapat diperoleh dari pelaku atau kesaksian secara langsung oleh seseorang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Menurut Louis Gottschalk sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi mata (Louis Gottschalk, 1975: 35). Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah: *Arsip Nasional Republik Indonesia*. 2004. Jakarta: Proyek Pemasarakatan dan Diseminasi Kearsipan Nasional.

Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata, yakni seorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkannya.

Pada umumnya semakin jauh waktu sumber sekunder dibuat dari peristiwa yang dikisahkan, maka sumber sekunder tersebut semakin dapat dipercaya. Untuk mendapat gambaran lain maka peneliti akan menggunakan sumber-sumber sekunder, diantaranya:

- 1) Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- 2) Imam Suhadi. 1981. *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- 3) Mohamad Roem. 1971. *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*. Bandung: Hudaya Dokumenta.
- 4) Harmaily Ibrahim. 1981. *Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- 5) Arbi Sanit. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 6) Baskara T. Wardaya. 2004. *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*. Jurnal Basis Edisi No. 03-04 Maret-April 2004. Yogyakarta

c. Kritik Sumber

Tidak semua data dan sumber yang diperoleh di lapangan dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Peneliti harus kritis terhadap sumber yang diperolehnya. Pengujian sumber yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan dengan data atau sumber lainnya serta dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kritik sumber yang dilakukan peneliti haruslah seobyektif mungkin, agar diperoleh data dan sumber yang benar-benar sesuai dengan penelitiannya.

d. Interpretasi

Menguraikan informasi dari data-data dan sumber yang sudah diperoleh serta sudah dipilih merupakan tahap dimana peneliti harus bisa berpikir logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah Ilmu Sejarah. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 1995: 100). Untuk menemukan fakta sejarah maka dilakukan sebuah analisis dan untuk menyatukan hasil interpretasi penulis terhadap data yang diperoleh dilakukan sintesis.

e. Historiografi

Tahap terakhir dalam metode sejarah kritis yaitu penulisan (historiografi), dari serangkaian tahap itu kemudian dituangkan peneliti dalam penulisan. Penyajian penulisan dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, (3) Simpulan (Kuntowijoyo, 1995: 100). Dukungan sumber-sumber yang valid serta lengkap, akan membantu penelitian ini menjadi penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pula sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan sejarah perlu adanya pengkajian metodologi dimana dalam metodologi tersebut diperlukan pendekatan ilmu lainnya. Penulisan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa akan tetapi menerangkan kejadian yang menjadi sebab-akibat, kondisi lingkungannya dan juga konteks sosial dan budaya. Penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Multidimensional yang termasuk dalam pendekatan ilmu sosial. Pendekatan Multidimensional adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih rumpun ilmu yang relevan (Sartono Kartodirdjo, 1993: 87). Penulisan sejarah tidak hanya bersifat deskriptif analisis, tetapi dikembangkan dengan menggunakan beberapa pendekatan yang multidimensional, yaitu mendekati suatu

peristiwa dengan berbagai aspek kehidupan politik, sosiologi, kultural dan ekonomi. Apalagi perkembangan ilmu sosial membuka horison-horison baru dalam memperkaya penulisan sejarah (Hariyono, 1995: 97). Pendekatan tersebut yaitu, sebagai berikut :

a. Pendekatan Sosiologis

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemadi yaitu ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial (Soerjono Soekanto, 2010: 18). Pendekatan sosiologis adalah pendekatan peranan faktor sosiologis yang menjelaskan peristiwa masa lalu (Soerjono Soekanto, 1983: 46). Dalam kerangka konseptualnya, sosiologis banyak mencakup konsep dan teori sosiologis. Pendekatan sosiologis membantu untuk menganalisis berbagai konflik kepentingan, terutama konflik/ ketegangan antar partai mengenai kepentingan-kepentingan dari partai tersebut dalam pemilu 1955.

b. Pendekatan Politik

Pendekatan politik menurut Delian Noor adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara dengan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Menurut Sartono Kartodirjo pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya (Sartono Kartodirjo, 1993: 5). Dalam penulisan sejarah ini, tinjauan politik digunakan untuk menjelaskan peran perkembangan dari ideologi nasionalis melawan ideologi agama dan ideologi komunis saling bersaing mendapatkan simpati rakyat dalam pemilihan umum. Sistem multi partai yang diterapkan di negara ini mendorong lahirnya

instabilitas politik dalam negeri karena tiap partai saling bersaing untuk memenuhi ambisi politiknya di pemerintahan.

II. KONDISI POLITIK SEBELUM PEMILIHAN UMUM 1955

a. Pelaksanaan Demokrasi Liberal

Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer sejak tahun 1950 yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, sehingga masa ini disebut masa demokrasi liberal. Indonesia dibagi menjadi 15 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan UUDS tahun 1950. Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multi-partai berlaku melalui Maklumat Pemerintah. Sistem multi-partai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama.

Di Indonesia, demokrasi liberal mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya dekrit presiden, sedang secara material berakhir pada saat gagasan Demokrasi Terpimpin dilaksanakan. Demokrasi Liberal disebut juga Demokrasi Parlementer, tapi tanpa parlemen yang sesungguhnya sampai diselenggarakannya pemilihan umum pertama tahun 1955 (Ahmad Syafii Maarif, 1996: 198). Dengan demikian, periode Demokrasi Liberal yang sesungguhnya baru dimulai setelah pemilihan umum pertama itu, sekalipun dalam praktiknya telah berjalan sejak November 1945.

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur). Bila dalam perjalanannya

kemudian salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang (umumnya ketua partai) untuk membentuk kabinet, kemudian setelah berhasil pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden. Suatu kabinet dapat berfungsi bila memperoleh kepercayaan dari parlemen, dengan kata lain ia memperoleh mosi percaya. Sebaliknya, apabila ada sekelompok anggota parlemen kurang setuju ia akan mengajukan mosi tidak percaya yang dapat berakibat krisis kabinet.

b. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Penulis membatasi langsung pada kabinet Wilopo karena pada masa kabinet ini mulai diberlakukannya Undang-Undang pemilihan umum yakni Undang-Undang Pemilihan Umum No. 7 Tahun 1953 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 9/1954. Undang-undang yang baru itu menetapkan pemilihan umum yang langsung. Belajar dari pemilihan umum Yogyakarta, dan pemilihan umum India pada 1951-1952, kabinet Wilopo memutuskan mengubah kebijakan pemilihan umum kabinet-kabinet sebelumnya yang memilih sistem tidak langsung (Herbert Feith, 1995: 5). Kabinet Wilopo berusaha untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama ini akan tetapi ditengah jalan kabinet ini mengalami demisioner karena berbagai hal.

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojokusarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah program dalam negeri yaitu menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan dan program luar negeri yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian

Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul seperti adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat, terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, dan munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa munculah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

c. Kabinet Ali Sastroamidjojo (1 Agustus 1953-24 Juli 1955)

Krisis pemerintahan di Indonesia membuat negara yang baru terbentuk ini mengalami ketidakstabilan. Dimana dalam upaya menjalankan roda pemerintahannya, Indonesia mengalami jatuh bangun. Hal ini yang kemudian mendorong terbentuknya Kabinet Ali untuk mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari (sepeninggalan Kabinet Wilopo). Setelah melakukan perundingan selama enam minggu dan melakukan berbagai upaya pembentukan partai, maka pada tanggal 31 Juli 1953 ” Kabinet Ali I” ini diresmikan dan dikenal dengan nama Kabinet Ali-Wongso. Mr. Ali Sastroamidjojo dari PNI merupakan perdana menteri dalam kabinet ini. Adapun Kabinet Ali merupakan kabinet yang terakhir sebelum Pemilihan Umum I (Poesponegoro dkk, 1993: 526).

Dalam Kabinet Ali, Masyumi merupakan partai terbesar kedua dalam parlemen tidak turut serta, dalam hal ini NU (Nahdatul Ulama) kemudian mengambil alih sebagai kekuatan politik baru. Selain itu terdapat tokoh yang bersimpati kepada PKI dimasukkan dalam kabinet

ini dan Muh Yamin yang dianggap sayap kiri dijadikan sebagai Menteri Pendidikan. Adapun struktur yang mengisi kabinet Ali, terdiri atas ini unsur-unsur dari PNI, Ali Sastroamidjojo melakukan perluasan birokrasinya dalam tubuh PNI. Ia menganggap tindakan tersebut sangat penting bagi pemilihan yang akan datang. Politik kebijakan yang diterapkan tersebut terlihat lebih mengutamakan mengenai pertahanan kekuasaan serta membagi hasil hasilnya atas penguasaan.

Kabinet Ali Sastroamidjojo ini tidak mampu mencapai semua program kerjanya. Walaupun digolongkan sebagai kabinet yang bertahan lama, tapi tidak semua hasil diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, kabinet ini telah berhasil memberi sumbangan bagi Indonesia, maupun benua Asia-Afrika. Adanya peristiwa pada 18 April-24 April 1955 itu disaksikan oleh Gedung Merdeka, Bandung. Saat itu Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika. Pada April-Mei-1954 terdapat pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Birma, dan Indonesia (diselenggarakan di Colombo). Sebenarnya situasi politik yang tidak stabil di Indonesia dialihkan ali pada suatu peristiwa yang bisa dikatakan mampu mengangkat nama Indonesia (Haryoto Kunto, 1996: 288). Disana Ali mengusulkan KAA, hal ini didukung oleh negara lain. Adapun KAA telah menunjukkan kemenangan bagi pemerintahan Ali, ketika itu terdapat 29 negara yang hadir (negara-negara besar Afrika, Asia hanya kedua Korea, Israel, Afrika Selatan, dan Mongolia luar yang tidak diundang).

III. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1955

a. Dasar Hukum dan Asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum 1955 ini memiliki beberapa dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950 menyebutkan bahwa kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menimbulkan suatu kenyataan bahwa negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Pasal 35 berbunyi “kemauan rakyat adalah dasar

kekuasaan penguasa, kemauan ini dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang menjamin kebebasan mengeluarkan suara". Pasal ini memerintahkan dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu (Harmaily Ibrahim, 1981: 79). Hal ini adalah dalam rangka melaksanakan pasal 1 ayat (2) tersebut.

Seperti diketahui bahwa UUDS 1950 bersifat sementara dan pada waktunya akan diganti dengan UUD yang tetap hasil karya Konstituante pilihan rakyat. Oleh karena itu, pasal 134 UUDS 1950 memerintahkan Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. UUDS 1950 pasal 135 ayat (2) menentukan bahwa anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti bahwa untuk penyusunan Konstituante tersebut harus melalui suatu pemilihan umum.

Persiapan untuk membuat suatu Undang-Undang Pemilihan Umum seperti telah diperintahkan oleh pasal 57 dan pasal 134 UUDS 1950, diantara tahun 1950-1952 tidak begitu lancar, meskipun pengalaman telah membuktikan bahwa kabinet yang silih berganti, tidak sanggup untuk memperoleh mayoritas yang stabil dalam Parlemen. Ketika suatu konflik serius pada tanggal 17 Oktober 1952 menandakan adanya kecenderungan anti-parlemen di dalam negeri barulah hal yang sangat penting dilaksanakan, dan pelaksanaan pemilihan umum dapat dirasakan oleh hampir semua golongan. Sekalipun demikian barulah pada tanggal 4 April 1953 rancangan Undang-Undang pemilihan umum dapat diundangkan sebagai Undang-Undang No.7 Tahun 1953. Undang-undang ini mengatur pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955. Pasal

35 UUDS 1950 dan juga pasal 135 ayat (2) menentukan asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia dan berkesamaan.

b. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pada tanggal 31 Juli 1954, Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk. Panitia ini diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Pada tanggal 16 April 1955, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman dari Hadikusumo sebagai ketua panitia pemilihan umum pusat mendorong partai untuk meningkatkan kampanyenya. Mereka berkampanye sampai pelosok desa. Setiap desa dan kota dipenuhi oleh tanda gambar peserta pemilu yang bersaing. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara yang terbanyak.

Untuk menyelenggarakan pemilihan dibentuk badan-badan penyelenggaraan yang dinamakan Panitia Pemilihan Indonesia di ibukota, Panitia Pemilihan di tiap daerah pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten di tiap kabupaten. Panitia itu terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah dengan dibantu partai politik, tanggung jawab pelaksanaan pada menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai (Imam Suhadi, 1981: 22). Panitia Pemilihan telah dibentuk sejak kabinet Wilopo yang diketuai Mr Asaat (non partai), tetapi terkatung-katung tidak menentu, maka pada waktu kabinet Ali diadakan penggantian yang diketuai S.Hadikusuma (PNI) dengan komposisi anggota-anggotanya sebagian besar mencerminkan partai-partai pemerintah, mendapat protes keras dari partai-partai di luar pemerintah.

Penyelenggaraan pemilihan umum ini, sama sekali terpisah dari eksekutif. Pemerintah disini bertindak sebagai penanggung jawab saja. Bahkan Panitia Pemilihan Indonesia dapat mengajukan pendapat-pendapat dan anjuran-anjuran serta usul usul baik diminta maupun tidak kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri mengenai pemilihan ini (pasal 133). Dengan demikian tidak ada anggapan bahwa

Pemerintah ikut campur tangan dalam pemilihan umum. Ini perlu untuk menjamin asas bebas dan rahasia dari pemilihan umum, dan dengan demikian maka pemilihan umum tersebut dapat dijalankan dengan demokratis.

c. Partai-Partai Peserta Pemilihan Umum

Pemilu 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja, tetapi juga oleh organisasi maupun perorangan. Dalam pemilihan umum anggota DPR diikuti peserta sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri atas: partai politik 36, organisasi 34, perorangan 48. Sementara itu peserta pemilihan umum anggota Konstituante terdiri atas: partai politik 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29. Herberth Feith mengelompokkan peserta pemilihan umum 1955 berdasarkan perolehan kursinya menjadi: Partai Besar, Partai Menengah, Kelompok kecil yang bercakupan Nasional, kelompok kecil yang bercakupan Daerah.

Partai Besar yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia). Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Nahdatul Ulama, PKI (Partai Komunis Indonesia). Partai Menengah yaitu PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katholik, PSI (Partai Sosialis Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). Kelompok kecil yang bercakupan Nasional yaitu PRN (Partai Rakyat Nasional), Partai Buruh, FPPS (Gerakan Pembela Pancasila), PRI (Partai Rakyat Indonesia), PPRI (Persatuan Polisi Republik Indonesia), Partai Murba, Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), PIR (Partai Indonesia Raya) Wongsonegoro, PPTI (Partai Persatuan Tarikat Islam), A Coma (Angkatan Communis Muda). Kelompok kecil yang bercakupan Daerah yaitu Gerinda – Yogyakarta, Partai Persatuan Daya – Kalimantan Barat, PRD (Partai Rakyat Desa) – Jawa Barat, R. Soedjono Prawonosodardo dan kawan-kawan – Madiun, Gerakan Pilihan Sunda – Jawa Barat, Partai Tani Indonesia – Jawa Barat, Raja keprabon dan kawan-kawan – Cirebon, Jawa Barat, Gerakan Banteng – Jawa Barat,

PIR (Persatuan Indonesia Raya) – Nusa Tenggara Barat, PPLM Idrus Effendi (Panitia Pendukung Pencalonan L.M. Idrus Effendi) – Sulawesi Tenggara.

d. Kampanye pemilihan umum

Tahap berikutnya adalah kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik guna mendapat suara dukungan dari masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1953 ini tidak ada yang mengatur waktu kampanye dan biaya kampanye, hanya ada beberapa daerah dengan alasan keamanan diatur waktu kampanye yaitu Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan dilarang kampanye tanggal 25 sampai 29 September (hari pemungutan suara), sedangkan di lain tempat diseluruh Indonesia dilarang kampanye tanggal 28 sampai 29 September. Kampanye pemilihan umum tahun 1955 berjalan sejak permulaan tahun 1953 sampai tahun pemilihan atau selama 2 tahun semasa kabinet Ali I. Suasana kampanye pemilihan umum sudah mempengaruhi secara luas kehidupan kepartaian maupun masyarakat umum, sehingga kegiatan partai-partaipun telah meningkat pada penonjolan ideologi, terutama berkisar pada masalah dasar negara.

Tanggal 4 April 1953, ketika rancangan undang-undang pemilihan umum disahkan menjadi undang-undang dapat dianggap sebagai awal kampanye tahap pertama. Sejak hari itu atau bahkan mungkin sejak Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mendorong pengabsahan undang undang pemilihan umum sudah timbul perasaan bahwa kemungkinan besar pemilihan umum akan diselenggarakan tidak lama lagi. Para pemimpin partai sudah tidak bisa lagi mendasarkan sepak terjang mereka terhadap janji-janji pemerintah mengenai pemilihan umum. Tanggal 31 Mei 1954 bisa dianggap awal kampanye tahap kedua, ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia, dan dengan demikian terbukalah jalan untuk kampanye berdasarkan tanda gambar (Herbert Feith, 1999: 10).

Pada masa awal kemerdekaan (1945-1949) partai-partai politik tidak hanya bertarung untuk memperebutkan kekuasaan politik di Republik ini, akan tetapi melalui sayap militer masing-masing untuk mempertahankan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Terdorong untuk menggalang dukungan aktif petani terhadap Republik, partai-partai memperluas pengaruh di desa-desa. Di pedesaan hanya sedikit persaingan diantara partai-partai yang muncul adalah kecenderungan suatu wilayah yang luas menjadi daerah partai tertentu. Akibatnya di tingkat desa tidak banyak dilakukan upaya untuk mendirikan organisasi resmi partai. Namun demikian tidak bisa disangkal, dampak partai-partai politik di pedesaan dapat dirasakan.

Partai-partai pemerintah menjadikan anti-kolonialisme bagian utama perlengkapan kampanye mereka. Mereka memuji-muji keteguhan kabinet membasmi sisa-sisa kekuasaan kolonial di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukannya untuk merebut kembali Irian Barat. Ketika Presiden Soekarno memperingatkan adanya upaya-upaya dari kekuatan asing untuk menggulingkan kabinet, yang menyiratkan dengan jelas bahwa para pemimpin oposisi terlibat dalam upaya ini, partai-partai pemerintah memperoleh argumen yang kuat. Mereka mendapat argumen yang lebih kuat lagi dengan berhasilnya pemerintah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, lima bulan sebelum diadakan pemilihan umum untuk Parlemen.

Dalam setiap kampanye nama tokoh-tokoh partai yang dipilih untuk ditonjolkan dalam kampanye, mengikuti urutan nama mereka dalam daftar calon untuk masing-masing daerah pemilihan. Oleh karena itu, partai-partai yang menempatkan pemimpin tunggal pada daftar tempat teratas dalam daftar calon seperti PKI, Masyumi, dan PSI misalnya menonjolkan ciri-ciri pribadi pemimpin yang bersangkutan. Partai-partai lain biasanya menaruh paling atas nama-nama calon yang dianggap punya daya tarik besar di daerah pemilih tertentu, dan menekankan ciri-ciri pribadi para calon yang bersangkutan dalam

kampanyenya. Prosedur pencalonan yang mudah, dan karena tidak ada batas bagi panjangnya daftar calon, mendorong pencalonan banyak orang yang tidak mungkin akan terpilih, tetapi yang punya nama di kalangan kelompok tersebut. Di tingkat desa, kampanye umumnya juga menonjolkan ciri-ciri pribadi tokoh desa.

Sangat beragam metode dan teknik kampanye yang digunakan dari partai-partai dan dari daerah-daerah. Pertemuan pertemuan diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau di balai desa dengan para pembicara dari Jakarta atau tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan perempuan atau pemuda, ceramah umum, pemutaran film, perayaan ulang tahun atau pawai, perayaan hari besar agama, dan pertemuan yang diramaikan teater rakyat. Pada waktu itu, demi pemilihan umum banyak orang yang dengan senang hati berjalan kaki sejauh lima kilometer atau lebih menuju ke tempat pemungutan suara. Ada pula yang harus naik perahu untuk mencapai pulau terdekat yang ada tempat memilihnya, dan yang paling adalah bahwa mereka tidak mengeluhkan hal itu (Baskara T Wardaya, 2004: 12).

IV. HASIL PEMILIHAN UMUM 1955

a. Hasil Pemungutan Suara

Hasil Pemilihan Umum tahun 1955 sebagai pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di negara kita sangat menarik perhatian masyarakat terutama ahli hukum Tata Negara baik dalam maupun luar negeri, sebab mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan ketatanegaraan, pemerintah, khususnya sistem demokrasi dan sistem kepartaian. Pada umumnya hasil pemilihan umum 1955 dirasakan masih kurang bagus, karena belum sesuai dengan harapan-harapan yang diharapkan dan telah lama ditunggu-tunggu. Namun sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan mawas diri dan untuk diambil manfaat dari pengalaman adalah sangat berguna, seperti Herbert Feith mengatakan bahwa Pemilihan Umum tahun 1955 di Indonesia sangat

menarik dan merupakan suatu eksperimen dalam pelaksanaan demokrasi, menarik perhatian mengenai mekanisme politik, yang menentukan dasar-dasar politik di Indonesia serta bahan analisa masyarakat (Imam Suhadi, 1981: 26).

Pada 29 September 1955 lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara. Sebanyak 37.875.299 atau 87,65 persen dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya, memberikan suara secara sah. Karena kesulitan komunikasi dan administrasi serta persoalan-persoalan khusus di daerah-daerah yang mengalami gangguan keamanan, mustahil menyelenggarakan pemungutan suara pada hari yang sama di seluruh Indonesia seperti yang direncanakan. Di 26 kabupaten pemungutan suara bisa dimulai tepat pada 29 September, tetapi baru selesai untuk seluruh kabupaten itu beberapa hari kemudian, dan di 8 kabupaten lainnya pemungutan suara baru bisa diadakan sesudah tanggal 29 September. Tetapi, pemungutan suara tepat pada 29 September dapat sekurang-kurangnya 85 persen dari lebih kurang 93.532 tempat pemungutan suara, dan diselesaikan seluruhnya pada 29 November (Herbert Feith, 1999: 57).

Pemungutan suara diselenggarakan di berbagai tempat, biasanya di gedung-gedung umum seperti sekolah atau di bangunan murah dari bambu yang didirikan di tempat-tempat umum khusus untuk keperluan pemungutan suara, tetapi kadang-kadang juga di rumah tokoh-tokoh desa. Rata-rata ada dua sampai tiga tempat pemungutan suara di satu desa. Menurut instruksi Panitia Pemilihan Indonesia, harus ada satu tempat pemungutan suara untuk setiap 300 dan 1000 orang pemilih. Pada prakteknya, di beberapa daerah lebih dari 1000 pemilih harus memberikan suara di satu tempat pemungutan suara, meski jumlah rata-rata adalah 460. Banyak pemilih dari desa-desa terpencil di pulau-pulau yang jarang penduduknya harus berjalan tujuh kilometer atau lebih ke tempat pemungutan suara, dan banyak pula yang harus berlayar ke pulau tetangga yang jauh letaknya. Walaupun demikian, tidak ada indikasi

bahwa ada orang yang menolak datang ke tempat pemungutan suara karena sebab ini.

Harus diakui tidak semua tempat pemilihan umum berjalan dengan mulus, khususnya di tempat-tempat yang jalur komunikasi dan transportasinya belum lancar. Namun secara umum dapat dikatakan kedua pemilihan umum itu, 29 September 1955 dan 15 Desember 1955, berjalan sesuai dengan rencana. Sesudah pemilu terlaksana, tekanan-tekanan politis maupun psikologis menurun drastis. Suasana intimidatif berubah menjadi suasana menjadi suasana partisipatif. Rakyat dengan bebas menentukan pilihan mereka. Pada hari-hari itu mereka sadar bahwa nasib tidak lagi ditentukan oleh faktor-faktor luar dari diri mereka. Pada umumnya masyarakat merasa bangga bahwa mereka baru saja ikut berperan serta dalam sebuah momen bersejarah untuk menentukan masa depan bangsa (Baskara T Wardaya, 2004: 12).

b. Analisis hasil pemilihan umum

Hasil penghitungan suara dalam Pemilu tahun 1955 menunjukkan bahwa PNI dan Masyumi mendapatkan jatah kursi yang sama sehingga tidak ada yang menang mutlak dalam pemilihan umum tahun 1955. Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, di Jawa Tengah, Masyumi hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh PNI, dan di Jawa Timur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi secara nasional tak terjadi dan dikalahkan oleh PNI.

Penghitungan suara untuk pemilihan umum bulan September selesai pada tanggal 29 November 1955, dengan hasil yang memunculkan banyak kejutan bagi para pemimpin politik maupun masyarakat. Dari sekitar tiga puluhan partai yang ikut, ternyata hanya ada empat partai yang mendapat perolehan suara lebih dari 16 persen. Partai-

partai lain hanya mendapat kurang dari 3 persen. Partai-partai yang masuk kategori empat besar untuk perolehan suara adalah: PNI memperoleh 22,3 persen. Masyumi memperoleh 20,9 persen, NU memperoleh 18,4 persen dan PKI diluar dugaan mendapatkan 16,4 persen. Empat partai lain yang mendapat suara 2 persen atau lebih adalah PSII, Parkindo, Partai Katholik dan PSI. Partai-partai yang lain hanya mendapat suara yang jauh lebih kecil, termasuk Nasution (IPKI) yang hanya memperoleh 1,4 persen suara.

Ternyata pemilihan umum telah menambah jumlah partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat, dan karenanya tidak satupun partai politik yang memperoleh wakil secara mayoritas, akibatnya dalam pembentukan Kabinet berikutnya masih terpaksa diadakan dengan koalisi dari berbagai partai politik. Pemilihan umum yang dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan partai politik tidak pernah tercapai. Walaupun demikian, ditinjau dari sudut pelaksanaan pemilihan umum tersebut, semua pihak merasa puas dalam arti pemilihan umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertulis, mulai dari saat kampanye sampai pada pemberian suara dan ternyata tidak terdengar keluhan bahwa telah dilanggar hak-hak asasi warga negara (Harmaily Ibrahim, 1981: 89).

Parlemen hasil pemilihan umum jelas tidak menghasilkan stabilitas politik, dan kenyataan ini menimbulkan kekecewaan yang semakin besar terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Tetapi, pemilihan umum menghasilkan hal-hal lain yang diharapkan para pemimpin Indonesia. Nilainya sebagai pendidikan politik sangat besar, pemahaman tentang politik tingkat nasional oleh penduduk desa-desa di Indonesia sangat meningkat. Pemilihan umum juga menghasilkan pemahaman yang lebih besar di Jakarta tentang desa di Indonesia dan menyingkapkan sejumlah mitos politik dan sosiologis yang sebelumnya diterima oleh para perencana sosial dan para politisi di ibukota.

Bagi kalangan militer, terutama angkatan darat, kemacetan konstituante dalam merumuskan UUD dan menanggapi tawaran Presiden dapat menjerumuskan negara dalam bahaya perpecahan. Pendapat itu memang beralasan karena negara sedang menghadapi masalah keamanan yang amat berat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara kepala staf angkatan darat, Letnan Jenderal A.H. Nasution, mengeluarkan larangan itu dikeluarkan atas nama pemerintah. Larangan itu di tindak lanjuti oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan suatu dekrit. Dekrit tersebut akibat pembubaran konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Tindakan Presiden tersebut mendapat sambutan dari kalangan militer, semua politisi, dan masyarakat yang telah jenuh dengan tidak kunjung selesainya krisis politik dan ekonomi dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya.

V. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah guna kepentingan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat turut serta memberikan aspirasi politiknya yang diperuntukan memilih para wakilnya di pemerintahan. Pemilihan umum adalah langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang telah tercantum dalam undang-undang dasar sementara. Untuk menyempurnakan undang-undang dasar yang masih bersifat sementara dan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Parlemen, maka pemerintah Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama di tahun 1955.

Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di Republik Indonesia ini berlangsung dalam dua tahap, yakni tanggal 29 September 1955 untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember untuk memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara.

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dalam tiga tahap kabinet yang berbeda. Pengesahan undang-undang dilakukan pada masa kabinet Wilopo yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum No.7 Tahun 1953 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9/1954 kemudian masa kampanye dilakukan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo sedangkan hari pemungutan suara dilakukan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Setelah dibubarkannya RIS atau sejak 1950, Indonesia melaksanakan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dengan meniru gaya barat. Selama 10 tahun pelaksanaan demokrasi parlementer ada tujuh kabinet yang berkuasa atau rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun hal ini dikarenakan sistem multipartai atau partai oposisi yang duduk di parlemen saling mengeluarkan mosi tidak percaya sehingga meruntuhkan kabinet.

Pemilu 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik saja, tetapi juga oleh organisasi maupun perorangan. Dalam pemilihan umum anggota DPR diikuti peserta sebanyak 118 peserta pemilu yang terdiri atas: partai politik 36, organisasi 34, perorangan 48. Sementara itu peserta pemilihan umum anggota Konstituante terdiri atas: partai politik 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29. Kampanye dilakukan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo dalam dua tahap, yaitu tahap pertama yaitu ketika disahkannya undang-undang pemilihan umum pada tanggal 4 April 1953 kemudian tahap kedua ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Mei 1954. Sangat beragam metode dan teknik kampanye yang digunakan dari partai-partai dan dari daerah-daerah seperti pertemuan pertemuan yang diselenggarakan di semua tingkat, di alun-alun kota atau di balai desa dengan para pembicara dari Jakarta atau tokoh partai setempat, rapat umum atau rapat anggota, pertemuan perempuan atau pemuda, ceramah umum, pemutaran film, perayaan ulang tahun atau pawai, perayaan hari besar agama, dan pertemuan yang diramaikan teater rakyat. Hasil pemungutan suara menempatkan empat partai besar pemenang pemilihan umum yang pertama ini yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- A Daliman. 2006. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.
- Ahmad Syafii Maarif. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anggar Kaswati. 1998. *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Ankersmith. 1984. *Refleksi tentang Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Arbi Sanit. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arsip Nasional Republik Indonesia*. 2004. Jakarta: Proyek Pemasarakatan dan Diseminasi Kearsipan Nasional.
- Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harmaily Ibrahim. 1981. *Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Haryoto Kunto. 1996. *Balai Agung di Kota Bandung*. Bandung: Granesia.
- Imam Suhadi. 1981. *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Koentjoro Poerbopranoto. 1975. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Jakarta: PT Eresco.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang.
- Louis Gottschalk. 1975. "Understanding History". ab Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Mohamad Roem. 1971. *Tinjauan Pemilihan Umum I dan II dari Sudut Hukum*. Bandung: Hudaya Dokumenta.
- Nugroho Notosusanto. 1971. *Norma-norma Dasar Penelitian Sejarah*. Jakarta: Dephankam.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Slamet Muljana. 2008. *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid II*, Yogyakarta: LIKS.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhartono W. Pranoto. 2006. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Turnan, George Mc. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. UNS: Pustaka Sinar Harapan.
- Usep Ranawidjaja. 2008. *Himpunan Kuliah Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Star.
- Wilopo, S. H. 1976. *Zaman Pemerintahan Partai Partai Dan Kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- _____. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal:

- Baskara T. Wardaya. 2004. *Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955*. Jurnal Basis Edisi No. 03-04 Maret-April 2004. Yogyakarta

Internet:

- <http://mylovelyhomework11.blogspot.com/2012/05/analisis-memahami-pemilu-indonesia.html> Diakses tanggal 31 Mei 2014, pukul 22.00 WIB